

# **PENGARUH KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT**

Oleh : Rima Sundari , Melly Agustiningrum  
Email : [rimasundari@poltekpos.ac.id](mailto:rimasundari@poltekpos.ac.id)

---

## **ABSTRAK**

Salah satu label yang menentukan besarnya Pendapatan Asli Daerah adalah besarnya Pendapatan Pajak Daerah. Realisasi Pendapatan Daerah mengalami kenaikan dan penurunan yang mengindikasikan bahwa potensi daerah belum memberikan kontribusi secara maksimal. Inilah yang kemudian menjadi fenomena dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2012-2016. Populasi dalam penelitian ini yaitu laporan realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Kota Bandung, Banjar, Bekasi, Bogor, Cimahi, Cirebon, Depok, Sukabumi, dan Tasikmalaya, dan sampel yang diteliti adalah laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Pada Kota Bandung, Banjar, Bekasi, Bogor, Cimahi, Cirebon, Depok, Sukabumi, dan Tasikmalaya Tahun 2012 sampai 2016. Penelitian menggunakan data sekunder yaitu data realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang diambil selama kurun waktu lima tahun, mulai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Data-data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. Alat yang digunakan dalam penelitian diantaranya Analisis Korelasi Produk Momen, Analisis Regresi Linier Sederhana, Analisis Koefisien Determinasi dan Uji-t. Hasil uji hipotesis penelitian menyimpulkan bahwa Kontribusi Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2012-2016.

**Kata Kunci : Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD).**

---

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Pada setiap pemerintah daerah terdapat sumber-sumber pendapatan daerah yang jika tiap daerah Provinsi ataupun Kabupaten dan Kota telah mengatur urusan pendapatannya secara optimal, maka hal tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan dalam penataan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Samudra (2015:54) pendapatan daerah yaitu “Sumber pendapatan meliputi tidak saja Pendapatan Asli Daerah (PAD), akan tetapi termasuk pula sumber pendapatan daerah yang berasal dari penerimaan pemerintah pusat yang dalam realisasinya dapat saja berbentuk bagi hasil penerimaan pajak dari pusat atau lainnya yang berbentuk subsidi (sokongan) untuk keperluan pembangunan daerah dan sebagainya”. “Salah satu sumber penerimaan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah” (Halim,2013:101). Adapun sumber Pendapatan Asli

Daerah (PAD) menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 Ayat 1 yaitu: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengeolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, “Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pada tiap pemerintah daerah terdapat sumber-sumber pendapatan daerah yang jika tiap daerah Provinsi ataupun Kabupaten dan Kota telah mengatur urusan pendapatannya secara optimal, maka hal tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan dalam penataan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada kota di Jawa Barat mengalami kenaikan dan penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi daerah yang ada di kota Provinsi Jawa Barat belum sepenuhnya memberikan kontribusi yang maksimal dari tahun ke tahun sehingga secara keseluruhan pemanfaatannya belum tercapai dengan optimal. Hal yang tersebut yang kemudian menjadi fenomena dalam penelitian ini, salah satu *table 2* yang menentukan besarnya Pendapatan Asli Daerah akan menjadi bahan kajian dalam penelitian ini yang salah satu faktornya yaitu mengenai besarnya Pendapatan Pajak Daerah.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perkembangan penerimaan pajak daerah, perkembangan penerimaan asli daerah pada kota yang berada di provinsi Jawa Barat untuk periode 2012 hingga 2016 serta mengetahui pengaruh kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah pada kota yang berada di provinsi Jawa Barat tahun 2012-2016. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pajak daerah merupakan komponen penting atau satu sumber utama penerimaan keuangan daerah dalam komponen Penerimaan Asli Daerah (PAD), sehingga membuatnya menjadi bagian yang sangat vital dalam penerimaan Asli Daerah (PAD).

Pajak daerah merupakan salah satu sumber dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Undang-undang nomor 32 tahun 2004 pasal 157 tentang pemerintahan daerah yaitu pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah yang pertama hasil pajak daerah, yaitu “pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan *table 2*. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya dapat dipaksakan”. Artinya pajak daerah dapat digunakan oleh pemerintah dalam hal pembiayaan pengeluaran suatu daerah. Apabila penerimaan dari pajak daerah tinggi, maka pendapatan asli daerah pun akan semakin tinggi dan hal ini akan dapat memicu daerah untuk lebih mengembangkan daerahnya tersebut.

## **2. Tujuan Penelitian**

Perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya menyebutkan beberapa pokok permasalahan yang ingin penulis uraikan dan jawab dalam penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui perkembangan Penerimaan Pajak Daerah pada Kota yang berada di Provinsi Jawa Barat periode 2012 hingga 2016

2. Untuk mengetahui perkembangan Penerimaan Asli Daerah pada Kota yang berada di Provinsi Jawa Barat periode 2012 hingga 2016
3. Untuk mengetahui pengaruh Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kota yang berada di Provinsi Jawa Barat periode 2012 hingga 2016

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan perumusan masalah asosiatif dan hubungan kausal. Menurut Sugiyono (2017:37) mengemukakan bahwa “rumusan masalah asosiatif adalah suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua  $X$  atau lebih.” Sedangkan hubungan kausal menurut Sugiyono (2017:37) mengemukakan bahwa “hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi disini ada  $X$  independen ( $X$  yang mempengaruhi) dan dependen yang (dipengaruhi).” Menurut Sugiyono (2017:39) “Variabel Independen. Variabel ini sering disebut sebagai  $X$  stimulus,  $X$ , antecedent. Dalam bahasa  $X$  sering disebut sebagai  $X$  bebas. Variabel bebas adalah merupakan  $X$  yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya  $Y$  dependen (terikat) dan Variabel Dependen sering disebut sebagai  $Y$  output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa  $X$  sering disebut sebagai  $Y$  terikat. Variabel terikat merupakan  $Y$  yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya  $X$  bebas. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua  $X$  yaitu  $X$  Pajak Daerah ( $X$ ) sebagai  $X$  bebas sedangkan  $Y$  Pendapatan Asli Daerah ( $Y$ ) sebagai  $Y$  dependen atau  $Y$  terikat.

Indikator yang digunakan yaitu Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2012-2016 pada kota di Provinsi Jawa Barat Kota Bandung yaitu Kota Banjar, Bekasi, Bogor, Cimahi, Cirebon, Depok, Sukabumi dan Tasikmalaya. Peneliti menggunakan skala pengukuran guna menghasilkan data kuantitatif yang akurat dan tepat. Menurut Sugiyono (2017:92) “skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif”.

Dalam operasionalisasi  $X$  penelitian ini, skala ukur yang digunakan adalah skala rasio. Menurut Sugiyono (2017:25) data rasio adalah “data yang jaraknya sama dan mempunyai nilai nol absolut. Jadi kalau data nol berarti tidak ada apa-apanya”. Skala ukur pada penelitian ini menggunakan data berupa angka yang didapat dari jumlah penerimaan pajak daerah dan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah yang didapat dari Badan Pusat Statistik Jawa Barat.

Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Kota Bandung, Banjar, Bekasi, Bogor, Cimahi, Cirebon, Depok, Sukabumi, dan Tasikmalaya. Teknik sampling dalam penelitian ini adalah *nonprobability sampling* dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *sampling purposive*. Sugiyono (2017:84) menyatakan “*Nonprobability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel”. Menurut Sugiyono (2017:85) “*sampling purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu”. Sedangkan menurut Wijaya (2013:28) sampel bertujuan (*purposive*) yaitu sampel yang memiliki tujuan untuk memahami informasi tertentu pada sumber tertentu. Dalam penelitian ini sampel yang diteliti adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Pada Kota Bandung, Banjar, Bekasi, Bogor, Cimahi, Cirebon, Depok, Sukabumi, dan Tasikmalaya Tahun 2012 sampai 2016. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan dan metode dokumentasi.

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu Analisis Korelasi Produk Momen yang produk momen, analisis linier regresi sederhana, analisis koefisien determinasi dan uji hipotesis dengan menggunakan uji t.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat melalui beberapa alat uji analisis. Pengolahan data tersebut dilakukan dengan menggunakan *software SPSS Versi 24* dan *Microsoft Excel 2010*.

### **1. Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah Pada Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2016**

Hasil dari perkembangan penerimaan Pajak Daerah pada kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2016 yaitu Pajak daerah kota Bandung dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2016 dikarenakan kinerja realisasi pajak hotel tahun 2016 ini dinilai lebih baik bila dibandingkan dengan tahun lalu, sedangkan kenaikan terendah terjadi pada tahun 2015 dikarenakan Pemkot Bandung pada 2015 memasang target BPHTB hanya Rp488 miliar, padahal potensinya dapat mencapai Rp631 miliar. Pajak daerah kota Banjar dari tahun 2012 sampai dengan 2016 mengalami kenaikan dan penurunan. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2013 dikarenakan terdapat pengalihan pengelolaan Bea Perolehan Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, sedangkan penurunan tertinggi terjadi pada tahun 2016 dikarenakan banyaknya masyarakat yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor. Pajak daerah kota Bekasi dari tahun 2012 sampai dengan 2016 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2013 dikarenakan didukung oleh tiga sektor besar seperti pajak penerangan jalan, pajak BPHTB, dan pajak restoran, sedangkan kenaikan terendah terjadi pada tahun 2016 yang dikarenakan pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Tanah dan Bangunan (BPHTB), pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak PJU, pajak reklame, pajak air tanah baru mencapai 90persen dari target. Pajak daerah kota Bogor dari tahun 2012 sampai dengan 2016 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2013 dikarenakan terdapat pengalihan pengelolaan Bea Perolehan Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Kenaikan terendah terjadi pada tahun 2015 dikarenakan kurangnya pencapaian target untuk pajak hotel. Pajak daerah kota Cimahi dari tahun 2012 sampai dengan 2016 mengalami kenaikan dan penurunan. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2013 yang disebabkan oleh kesadaran masyarakat dan partisipasinya dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sedangkan penurunan terjadi pada tahun 2016 yang disebabkan oleh kurangnya pencapaian target dalam pajak penerangan jalan, parkir, hiburan, resto dan hotel.

Pajak daerah kota Cirebon dari tahun 2012 sampai dengan 2016 mengalami kenaikan dan penurunan. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2013 yang disebabkan oleh terdapat pengalihan (PBB-P2). Sedangkan penurunan terjadi pada tahun 2016 yang disebabkan oleh kurangnya target pencapaian dalam sector hiburan, hotel dan restoran. Pajak daerah kota Depok dari tahun 2012 sampai dengan 2016 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2014 yang disebabkan oleh meningkatnya pajak restoran, hotel dan retribusi. Sedangkan kenaikan terendah terjadi pada tahun 2016 yang disebabkan oleh pencapaian target reklame yang kurang optimal. Pajak daerah kota Sukabumi dari tahun 2012 sampai dengan 2016 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2013 yang dikarenakan cukup banyak pajak kendaraan bermotor yang terhimpun. Sehingga 5able5le55 tahun lalu, penghasilan pun jauh berbeda. Sedangkan kenaikan terendah terjadi pada tahun 2016 yang disebabkan oleh kurangnya kinerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Sukabumi dalam pencapaian target. Pajak daerah kota Tasikmalaya dari tahun 2012 sampai dengan 2016 mengalami kenaikan dan penurunan. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2013 yang disebabkan oleh pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2013 yang melebihi targe. Sedangkan penurunan terjadi pada tahun 2016 yang disebabkan oleh pemerintah telah menerbitkan PP 60 Tahun 2016 tentang jenis dan 5able5 penerimaan 5able5 bukan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Dengan Kebijakan tersebut, 5able5 PKB mengalami kenaikan dan jumlah masyarakat yang membayar PKB mengalami penurunan karena besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar PKB.

## **2. Perkembangan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pada Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2016**

Hasil dari perkembangan penerimaan pendapatan asli daerah pada kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2106 yaitu Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kenaikan paling rendah terjadi pada tahun 2015 dikarenakan terdapat masalah mekanisme dan manajerial pemungutan pajak sehingga target tidak tercapai dan kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2016 karena pemerintah kota Bandung menambahkan mata pungutan retribusi baru diantaranya penyelenggaraan retribusi pengendalian lalu lintas, retribusi tempat rekreasi dan olahraga berskala nasional. Sehingga dapat mengoptimalkan sebagai pendapatan melalui retribusi daerah. Pendapatan Asli Daerah Kota Banjar dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 mengalami kenaikan setiap tahunnya, sedangkan pada tahun 2016 mengalami penurunan. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2014 dikarenakan Pendapatan Asli Daerah tertinggi didapati dari Badan Layanan Umum Daerah RSUD (Rumah Sakit) sebesar Rp. 72 milyar . Penurunan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2016 yaitu dibandingkan dengan tahun 2015 dikarenakan Pemerintah merealisasikan penghapusan pajak bumi dan bangunan (PBB) dan larangan iklan rokok sehingga Kota Banjar kehilangan dua sumber Pendapatan. Pendapatan Asli Daerah pada Kota Bekasi dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2013 Peningkatan ini didukung dari tiga 5able5 besar seperti Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bea Perolehan 5able5le Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Restoran. Sedangkan kenaikan paling rendah terjadi pada tahun 2016 dikarenakan beberapa 5able5 pajak gagal dalam memenuhi pencapaiannya terutama pada pajak 5able5, pajak reklame dan pajak air tanah.

Pendapatan Asli Daerah pada Kota Bogor dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2013 dikarenakan adanya pengalihan pajak air tanah dari pemerintah pusat sejak tahun 2011. Sedangkan kenaikan paling rendah terjadi pada tahun 2016 dikarenakan menurunnya penerimaan pajak reklame seiring dengan diterbitkannya Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang reklame, di mana salah satu pasalnya mengatur zona bebas reklame dan sampah visual di kawasan seputar Kebun Raya Bogor yang berlaku pada tahun 2016. Pendapatan Asli Daerah pada Kota Cimahi dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 mengalami kenaikan setiap tahunnya, sedangkan tahun 2016 mengalami penurunan. Penurunan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2016 dikarenakan realisasi retribusi terminal tidak sesuai target dikarenakan salah satu terminal, yakni Pasar Atas tidak dilakukan pungutan retribusi sebab sedang dalam tahap renovasi. Pendapatan Asli Daerah pada Kota Cirebon dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 mengalami kenaikan setiap tahunnya, sedangkan pada tahun 2016 mengalami penurunan. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2014 dikarenakan realisasi pajak tertinggi diperoleh dari penerimaan pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak hotel. Penurunan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2016 dikarenakan penerimaan pajak reklame di Kota Cirebon selama 2016 mengalami perlambatan 6 bulan karena tahun ini papan reklame sering kosong sehingga berdampak pada penerimaan pajaknya.

Pendapatan Asli Daerah pada Kota Depok dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 mengalami kenaikan setiap tahunnya, sedangkan pada tahun 2016 mengalami penurunan. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2015 karena kontribusi yang paling besar dan mengalami peningkatan adalah dari penerimaan pajak daerah. Khususnya pajak hotel dan restoran serta penerimaan dari retribusi daerah. Penurunan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2016 dikarenakan peningkatan jumlah reklame di Kota Depok, tidak sebanding lurus dengan perolehan pajak yang dihasilkan. Bahkan menurun hingga 2 miliar dari tahun sebelumnya. Atas kejadian ini, pendapatan asli daerah (PAD) mengalami penurunan. Pendapatan Asli Daerah pada Kota Sukabumi dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2014 dikarenakan pemasukan yang paling besar didapati dari restoran, rumah sakit, dan wisata kuliner. Sedangkan kenaikan paling rendah terjadi pada tahun 2015 karena kurangnya pemasukan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikarenakan jeleknya sarana dan prasarana, serta infrastruktur jalan ke tempat wisata. Pendapatan Asli Daerah pada kota Tasikmalaya dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 mengalami kenaikan setiap tahunnya, sedangkan pada tahun 2015 mengalami penurunan. Penurunan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2015 dikarenakan Pemerintah Kota Tasik belum mandiri. Artinya masih ketergantungan pada bantuan dari luar daerah untuk biaya kebutuhan berbagai macam program dan sebagian besar pendapatan didapatkan dari dana perimbangan. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2016 dikarenakan penerimaan dari pajak retribusi, Uji kir, PBB maupun reklame mengalami peningkatan, serta Pemda memiliki potensi untuk meningkatkan PAD yaitu dari pariwisata lebih ditata lebih baik lagi supaya potensi PAD hasilnya lebih memuaskan.

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa perkembangan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2012 sampai dengan 2016 pada kota di Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan yaitu kota Bandung, Bekasi, Bogor, dan Sukabumi. Namun terdapat juga kota yang mengalami penurunan pada tahun 2012 sampai 2016 yaitu kota Banjar, Cimahi, Cirebon, Depok

dan Tasikmalaya. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan penerimaan pendapatan asli daerah pada kota Jawa tahun hingga

Correlations			
		Pajak Daerah	PAD
Pajak Daerah	Pearson Correlation	1	.993**
	Sig. (1-tailed)		.000
	N	45	45
PAD	Pearson Correlation	.993**	1
	Sig. (1-tailed)	.000	
	N	45	45

di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2012-2016

menunjukkan angka yang cukup baik.

### 3. Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2016

#### a. Analisis Korelasi *Product Moment*

Menurut Sugiyono (2017:228) Analisis Korelasi *Product Moment* “digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila data kedua variabel berbentuk interval atau rasio”. Maka dengan pengujian ini dapat membantu peneliti dalam menguji seberapa kuat hubungan variabel independen Pajak Daerah (X) terhadap variabel dependen Pendapatan Asli Daerah (Y). *Output software SPSS V.24* dari korelasi parsial antara pajak daerah terhadap pendapatan daerah adalah sebagai berikut :

**Tabel 1: Analisis Korelasi *Product Moment***

Sumber: *Output SPSS Versi 24*, data diolah penulis

Dari tabel diatas, diperoleh nilai koefisien korelasi antara Pajak Daerah (X) dan Pendapatan Asli Daerah (Y) adalah sebesar  $r = 0,993$ . Berdasarkan hasil diatas, maka menunjukkan bahwa korelasi dari kedua variabel diatas masuk dalam tingkat hubungan sangat kuat jika dilihat dari pedoman untuk memberikan interpretasi terhadap koefisien korelasi karena nilai 0,993 terdapat

pada interval koefisien antara 0,80 sampai 1,000. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kontribusi pajak daerah dan pendapatan asli daerah memiliki hubungan yang sangat kuat.

### b. Analisis Regresi Linier Sederhana

Menurut Sugiyono (2017:188) analisis regresi sederhana digunakan untuk “meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya)  $Y$  dependen bila  $X$  independen sebagai  $Y$  dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya)”. Sehingga dalam penelitian ini, analisis regresi linier sederhana digunakan untuk menghasilkan persamaan yang akan menghubungkan antara dua  $Y$  yaitu  $X$  dan  $Y$  sekaligus untuk menentukan nilai ramalan atau dugaan. Berikut hasil analisis regresi linier sederhana dari  $X$  independen Pajak Daerah ( $X$ ) dan  $Y$  dependen Pendapatan Asli Daerah ( $Y$ ) yang telah diuji oleh *software SPSS V.24*.

**Tabel 2: Analisis Regresi Linier Sederhana**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	120690190.50	13104503.75		9.21	.00
	PajakDaerah	1.18	.02	.99	55.69	.00

a. Dependent Variabel: PAD

Sumber: *Output SPSS Versi 24*, data diolah penulis.

Hasil analisis regresi linear sederhana dari  $Y$  dependen yaitu pendapatan asli daerah terhadap  $X$  independen yaitu pajak daerah menunjukkan nilai konstanta (a) sebesar 120.690.190,500 dengan koefisien regresi (b) sebesar 1,183. Dengan demikian persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y = 120.690.190,500 + 1,183X$$

Berdasarkan persamaan tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai konstanta (a) sebesar = 120.690.190,500 artinya jika pajak daerah ( $X$ ) nilainya adalah 0, maka pendapatan asli daerah ( $Y$ ) nilainya yaitu sebesar = 120.690.190,500. Hal ini mengindikasikan bahwa pengaruh  $Y$  pendapatan asli daerah terhadap  $X$  pajak daerah adalah positif, hal ini menunjukkan bahwa kenaikan dari pajak daerah akan diikuti oleh kenaikan pendapatan asli daerah.

Koefisien regresi  $X$  pajak daerah ( $x$ ) sebesar 1,183 yang artinya jika pajak daerah mengalami kenaikan sebesar satu unit satuan, maka pendapatan asli daerah ( $y$ ) akan mengalami peningkatan sebesar 1,183. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara pajak daerah dengan pendapatan asli daerah, semakin naik pajak daerah maka semakin meningkatkan pendapatan asli daerah. Sedangkan berdasarkan hasil pengujian pada *SPSS* yaitu pada *Coefficient* diketahui nilai Sig. sebesar 0,000 (artinya nilai Sig tersebut < 0,05) maka dapat disimpulkan  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya ada pengaruh yang signifikan antara kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.

### c. Analisis Koefisien Determinasi

Purwanto dan Sulistyastuti (2011:195) mengemukakan bahwa Analisis koefisien determinasi yaitu “analisis koefisien determinasi pada prinsipnya mengukur seberapa besar kemampuan



model menjelaskan variasi  $Y$  dependen yang dinyatakan dalam bentuk persentase”. Sehingga pada penelitian ini analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah dalam bentuk persentase. Berikut hasil analisis koefisien determinasi dari  $Y$  independen Pajak Daerah ( $X$ ) dan  $Y$  dependen Pendapatan Asli Daerah ( $Y$ ) yang telah diuji oleh *software SPSS V.24*:

**Tabel 3 : Analisis Koefisien Determinasi**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.993	.986	.986	69231286.1200
a. Predictors: (Constant), PajakDaerah				

Sumber: *Output SPSS Versi 24*, data diolah penulis

Berdasarkan  $Y$  di atas, maka dapat diketahui nilai  $R^2$  (R square) adalah sebesar 0,986. Dari nilai tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah dipengaruhi oleh kontribusi pajak daerah sebesar 0,986. Hal ini mengindikasikan bahwa persentase pendapatan asli daerah dipengaruhi oleh pajak daerah sebesar 98,6% dan 1,4% dipengaruhi oleh  $Y$  lain yang tidak diteliti.

#### d. Pengujian Hipotesis (Uji-t)

Dalam penelitian ini, Uji t digunakan untuk mengetahui apakah suatu hipotesis yang dilakukan dapat diterima atau ditolak. Uji t dikenal sebagai uji parsial, yaitu untuk menguji pengaruh  $Y$  bebas terhadap  $Y$  terikatnya. Salah satu pengujian t dalam  $Y$  yaitu uji satu arah. Menurut sugiyono (2017:163) “pengujian satu arah digunakan ketika kita memiliki dasar teori yang kuat mengenai pengaruh  $Y$  bebas terhadap  $Y$  terikat”. Setelah diketahui bahwa pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah sangat kuat, maka perlu diuji signifikansi pengaruh tersebut. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah perlu dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan uji t satu pihak (*one-tailed*) yaitu uji pihak kanan. Pengujian hipotesis ini didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

- Jika  $t_{hitung} \leq t_{table}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2016
- Jika  $t_{hitung} > t_{table}$ , maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak, artinya ada pengaruh yang signifikan antara Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2016

Hasil Pengujian Hipotesis Menggunakan SPSS dengan analisis uji t disajikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 3 : Hasil Pengujian Uji t**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	120690190.50	13104503.75		9.21	.00

PajakDaerah	1.18	.02	.99	55.69	.00
a. Dependent Variabel: PAD					

Sumber: *Output SPSS Versi 24*, data diolah penulis

Hasil uji t menggunakan program SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*) versi 24 dapat dilihat pada tabel 4.6. Hasil uji t satu pihak (*one-tailed*) di atas menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung}$  sebesar 55,690. Karena  $t_{hitung}$  berada pada  $t_{hitung} \geq t_{tabel}$  ( $55,690 > 1,68107$ ) atau jatuh pada daerah penolakan  $H_0$ , maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Pengambilan keputusan signifikansi juga dapat dilihat dari nilai sig. Pada tabel 4.5 yaitu sebesar  $0,00 < 0,05$  ( $\alpha$ ). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Artinya Ada pengaruh yang signifikan antara Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2016

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2016, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa: Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah pada kota di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2012-2016 menunjukkan angka yang cukup baik. Perkembangan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada kota di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2012-2016 menunjukkan angka yang cukup baik. Sedangkan Kontribusi Pajak Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah pada kota.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahira, Anne: 2012. *Pengertian Kontribusi*. Bandung: Kencana.
- Mardiasmo. 2016. *Pengantar Perpajakan*. Bandung: Andi.
- Nazir, Moh.2013. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nuryaman. Christina, Veronica. 2015. *Metode Penelitian Akuntansi dan Bisnis*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Priantara, Diaz. 2016. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan*. Jakarta Selatan: Salemba Empat
- Sugiyono.2017.*Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta